


2026



**PEMERINTAH DESA  
TENGGULUNAN**

# APBDES

 [desatenggulunan@gmail.com](mailto:desatenggulunan@gmail.com)

 [Tenggulunan.desa.id](http://Tenggulunan.desa.id)

 Jl. Kates Besar No.23 Desa Tenggulunan Kecamatan Candi



**PERATURAN DESA TENGGULUNAN  
NOMOR 10 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

**DESA TENGGULUNAN**

**TAHUN ANGGARAN 2026**



**DESA TENGGULUNAN KECAMATAN CANDI**

**KABUPATEN SIDOARJO**

**2025**



KEPALA DESA TENGGULUNAN  
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA TENGGULUNAN  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TENGGULUNAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TENGGULUNAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 4 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 14 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
- 15 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);

- 16 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
- 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 284-9/2015);
- 19 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
- 20 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
- 21 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
- 22 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);
- 23 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
- 24 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di

- Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
- 25 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 23);
  - 26 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
  - 27 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 27);
  - 28 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 50);
  - 29 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 62 Tahun 2025 Tentang Perubahan Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 62);
  - 30 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  - 31 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 67 tahun 2024

- tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 68);
- 32 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 64);
  - 33 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 64);
  - 34 Peraturan Desa Tenggulunan Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  - 35 Peraturan Desa Tenggulunan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Tenggulunan Tahun 2018 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Tenggulunan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Tenggulunan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Tenggulunan Tahun 2025 Nomor 4);
  - 36 Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tenggulunan Tahun anggaran 2025 (Lembaran Desa Tenggulunan Tahun 2025 Nomor 05);
  - 37 Peraturan Desa Tenggulunan Nomor 09 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tenggulunan Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tenggulunan Tahun 2025 Nomor 09);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGULUNAN  
Dan  
KEPALA DESA TENGGULUNAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TENGGULUNAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TENGGULUNAN Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.815.899.605,00
2. Belanja Desa	Rp	2.888.226.658,05
Surplus/Defisit	Rp	(72.327.053,05)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	172.327.053,05
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	72.327.053,05
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

---

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TENGGULUNAN.



Diundangkan di : TENGGULUNAN  
pada tanggal : 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA

SULISPHYONO

LEMBARAN DESA TENGGULUNAN NOMOR 10 TAHUN 2026



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TENGGULUNAN  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	326.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.487.399.605,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.815.899.605,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	811.360.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.387.925.750,55	
5.3.	Belanja Modal	512.940.907,50	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	176.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.888.226.658,05</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(72.327.053,05)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	172.327.053,05	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	172.327.053,05	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>72.327.053,05</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

PEMERINTAH KABUPATEN SIDHARJEN  
 TENGGULUNAN, 31 December 2025  
 KEPALA DESA  
 TENGGULUNAN  
 AHMAD IDOM MAUN

**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA  
PEMERINTAH DESA TENGGULUNAN KECAMATAN CANDI  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>			
6.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			<b>172.327.053,05</b>
6.1.1.	<b>SILPA Tahun Sebelumnya</b>			<b>172.327.053,05</b>
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			172.327.053,05
	01. SILPA Pendapatan Asli Desa	PAD	1 Ls	15.154.699,23
	02. SILPA Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	167.133,92
	03. SILPA Dana Desa (Dropping APBN)	DDS	1 Ls	101.735.907,50
	04. SILPA Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	PBH	1 Ls	55.269.312,40
	05. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota	PBK	1 Ls	0,00
	06. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi	PBP	1 Ls	0,00
	07. SILPA Swadaya Masyarakat	SWD	1 Ls	0,00
	08. SILPA Pendapatan Lain Lain	DLL	1 Ls	0,00
6.2.	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			<b>100.000.000,00</b>
6.2.2.	<b>Penyertaan Modal Desa</b>			<b>100.000.000,00</b>
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			100.000.000,00
	01. Penyertaan Modal untuk Koperasi Desa Merah Putih	DDS	1 Ls	100.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>			<b>72.327.053,05</b>



TENGGULUNAN, 31 December 2025

SEKRETARIS DESA

  
SULISTYONO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TENGGULUNAN  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	326.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.487.398.605,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.815.899.605,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.362.304.051,32</b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.133.170.991,87</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD. PBH
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	383.040.000,00	ADD. PBH
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	383.040.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	DDS. PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	229.910.991,87	ADD. DDS. DLL. I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	229.910.991,87	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	66.600.000,00	ADD. PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	66.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.000.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.200.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	42.700.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.700.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	49.780.000,00	PAD. PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	49.780.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	219.940.000,00	PAD. PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	219.940.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.93		Purna Bhakti Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tali Asih BPD	20.000.000,00	PAD
1.1.93	5.1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>51.000.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	41.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3	Belanja Modal	41.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10.000.000,00	PBH
1.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>10.000.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>68.867.400,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.570.000,00	DDS
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.570.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembuk desa Non Reguler)	15.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.264.000,00	DDS
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.264.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	13.713.400,00	PBH
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.713.400,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.320.000,00	PBH
1.4.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.90		Jasa Pendampingan Hukum	5.000.000,00	PBH
1.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>99.265.659,45</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.680.000,00	PAD
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.680.000,00	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	91.585.659,45	PBH
1.5.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	91.585.659,45	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>831.897.606,73</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>63.010.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	21.420.000,00	DDS
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	21.420.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	19.050.000,00	DDS
2.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.02	5.3	Belanja Modal	14.050.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	12.540.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.540.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.000.000,00	PAD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>295.802.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	8.500.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	190.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.950.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	34.450.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	58.902.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.902.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	28.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>431.980.606,73</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	200.000.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Masyarakat	19.244.699,23	PAD
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.244.699,23	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	10.000.000,00	PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	5.000.000,00	PAD
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	96.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	96.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	101.735.907,50	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	101.735.907,50	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>41.105.000,00</b>	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)	25.705.000,00	DDS
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	25.705.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	10.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	5.400.000,00	PAD
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>215.025.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>43.000.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	33.000.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy Skala Lokal Desa	10.000.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>88.375.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	66.775.000,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.775.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	21.600.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>45.400.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Ke c/Kab/Kota	10.000.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	20.000.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Des a	8.000.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.400.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>38.250.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	24.120.000,00	PAD, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.120.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.130.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.130.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>305.000.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>285.000.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	285.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	285.000.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>20.000.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	20.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>174.000.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>15.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>15.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	15.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	DDS
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>144.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.888.226.658,05</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(72.327.053,05)</b>	
	6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	172.327.053,05	
	6.2	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>72.327.053,05</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**KECAMATAN CANDI**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TENGGULUNAN**  
Jalan kates Besar No.23 Telepon 031-8953989

KODE POS : 61271

**PERSETUJUAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGULUNAN**  
**KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA TENGGULUNAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami anggota Badan Permusyawaratan Desa Tenggulunan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dengan ini menyetujui rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja desa Tenggulunan Tahun Anggaran 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	M. Ridwan, SE	KETUA	1.
2.	Joko Priyono	WAKIL KETUA	2.
3.	Adit Priyo Gutomo	SEKRETARIS	3.
4.	Apriantoni	ANGGOTA	4.
5.	Agus Subakti	ANGGOTA	5.
6.	Deddy Kurniawan, SE	ANGGOTA	6.
7.	Ita Hyni Wijaya	ANGGOTA	7.

Sidoarjo, 30 Desember 2025  
Ketua BPD Tenggulunan  
  
**MUHAMMAD RIDWAN**

**BERITA ACARA**  
**RAPAT TENTANG PEMBAHASAN DAN PENETAPAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

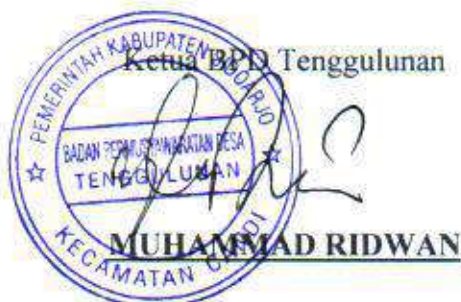
Pada hari ini, Selasa tanggal 30 Desember 2025 telah berlangsung rapat antara Pemerintah Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Tenggulunan di hotel surya Tretes kec. Prigen - Pasuruan. Telah hadir dalam rapat tersebut, antara lain :

1. Kepala Desa Tenggulunan beserta Perangkat Desa
2. Ketua dan Anggota BPD Tenggulunan

Dalam rapat tersebut telah dibahas pokok-pokok permasalahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tenggulunan Tahun Anggaran 2025. Setelah dilakukan pembahasan dan perubahan serta saran dan usulan dari para anggota BPD yang hadir, maka dapat disimpulkan bahwa, semua anggota BPD yang hadir menerima dan menyetujui serta mengesahkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tenggulunan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut :

a.	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tenggulunan Tahun Anggaran 2026	Rp 2.815.899.605,00
b.	Jumlah Belanja Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tenggulunan Tahun Anggaran 2026 meliputi:	
	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.362.304.015,32
	2. Bidang Pembangunan Desa	Rp 831.897.606,73
	3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan	Rp 215.025.000,00
	4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 305.000.000,00
	5. Bidang penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp 174.000.000,00
	Jumlah Belanja	Rp 2.888.226.658,05
	Surplus/Defisit	Rp (272.327.053,05)
c.	Jumlah Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tenggulunan adalah :	
	1. Penerimaan Pembiayaan	
	SILPA	Rp 172.327.053,05
	2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 100.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (1-2)	Rp 272.327.053,05
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan kenyataan dan sebenarnya.





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**KECAMATAN CANDI**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TENGGULUNAN**  
Jalan kates Besar No.23 Telepon 031-8953989

KODE POS : 61271

**DAFTAR HADIR BPD DESA TENGGULUNAN**

HARI/TANGGAL : SELASA, 30 DESEMBER 2025

TEMPAT : HOTEL SURYA TRETES

TENTANG : PERSETUJUAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	M. Ridwan, SE	KETUA	1.
2.	Joko Priyono	WAKIL KETUA	2.
3.	Adit Priyo Gutomo	SEKRETARIS	3.
4.	Apriantoni	ANGGOTA	4.
5.	Agus Subakti	ANGGOTA	5.
6.	Deddy Kurniawan, SE	ANGGOTA	6.
7.	Ita Hyni Wijaya	ANGGOTA	7.

Sidoarjo, 30 Desember 2025  
Ketua BPD Tenggulunan  
  
**MUHAMMAD RIDWAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**KECAMATAN CANDI**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TENGGULUNAN**  
Jalan kates Besar No.23 Telepon 031-8953989

KODE POS : 61271

**KEPUTUSAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGULUNAN**

**Nomor : 188.4 / 12 / BPD.TGLN / XII / 2025**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN TERHADAP**

**RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDDES TAHUN ANGGARAN 2026  
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGULUNAN**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes Tahun Anggaran 2026, perlu mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka dipandang perlu memberikan persetujuan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes Tahun Anggaran 2026 dimaksud dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tenggulunan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja;
  4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
  8. Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Sanksi Pemotongan/Penundaan DAU dan Dana Bagi Hasil Bagi Kabupaten/Kota yang Tidak Menyampaikan ADD (Alokasi Dana Desa);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo;
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Desa Tengguluan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Tengguluan Tahun 2018 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Tengguluan Nomor 4 Tahun 2025

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Tenggulunan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Tenggulunan Tahun 2025 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tenggulunan Tahun anggaran 2025 (Lembaran Desa Tenggulunan Tahun 2025 Nomor 05);
  22. Peraturan Desa Tenggulunan Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  23. Peraturan Desa Tenggulunan Nomor 08 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Tenggulunan Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tenggulunan Tahun 2025 Nomor 08);

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA** : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut :
- |     |                  |                     |
|-----|------------------|---------------------|
| I   | Pendapatan Desa  | Rp 2.815.899.605,00 |
| II  | Belanja Desa     | Rp 2.888.226.658,05 |
| III | Pembiayaan Desa  | Rp 172.327.053,05   |
| IV  | Penyertaan Modal | Rp 100.000.000,00   |
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada Tanggal : 30 Desember 2025  
KETUA BPD TENGGULUNAN  
  
MUHAMMAD RIDWAN



**PERATURAN KEPALA DESA TENGGULUNAN  
NOMOR 05 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TENGGULUNAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**



**DESA TENGGULUNAN KECAMATAN CANDI  
KABUPATEN SIDOARJO  
2025**



KEPALA DESA TENGGULUNAN  
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO  
PERATURAN KEPALA DESA TENGGULUNAN  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TENGGULUNAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TENGGULUNAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6398);
- 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  - 4 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
  - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  - 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  - 8 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
  - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

- Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  - 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  - 14 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  - 15 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
  - 16 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
  - 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
  - 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 284-9/2015);
  - 19 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
  - 20 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
  - 21 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun

- 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
- 22 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);
  - 23 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
  - 24 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
  - 25 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 23);
  - 26 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
  - 27 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 27);
  - 28 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 50);
- 29 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 62 Tahun 2025 Tentang Perubahan Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 62);
  - 30 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  - 31 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 67 tahun 2024 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 68);
  - 32 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 64);
  - 33 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 64);
  - 34 Peraturan Desa Tenggulunan Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  - 35 Peraturan Desa Tenggulunan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Tenggulunan Tahun 2018 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Tenggulunan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Tenggulunan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Tenggulunan Tahun 2025 Nomor 4);
  - 36 Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tenggulunan Tahun anggaran 2025 (Lembaran Desa Tenggulunan Tahun 2025 Nomor 05);
  - 37 Peraturan Desa Tenggulunan Nomor 09 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa

Tenggulunan Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tenggulunan Tahun 2025 Nomor 09);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TENGGULUNAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 , terdiri dari :

1.	Pendapatan Desa		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	Rp	326.500.000,00
1.2.	Transfer	Rp	2487.399.605,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	2.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	Rp	2.815.899.605,00
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.362.304.051,32
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	831.897.606,73
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	215.025.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	305.000.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	174.000.000,00
	Jumlah Belanja	Rp	2.888.226.658,05
	Surplus/Defisit	Rp	(72.327.053,05)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	172.327.053,05
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
	Selisih pembiayaan	Rp	72.327.053,05
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa TENGGULUNAN.

Diundangkan di : TENGGULUNAN  
Pada tanggal : 31 Desember 2025  
KEPALA DESA,  
MAMAD IDOM MAUN



Diundangkan di : TENGGULUNAN  
Pada tanggal : 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA

SULISTIYONO

BERITA DESA TENGGULUNAN TAHUN 2026 NOMOR 5



PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TENGKULUNAN  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING	2	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
4		<b>PENDAPATAN</b>				
4.1		Pendapatan Asli Desa			<b>326.500.000,00</b>	
4.1.2		Hasil Aset Desa			203.500.000,00	
4.1.2.01		Pengelolaan Tanah Kas Desa			1.10.500.000,00	
4.1.2.07		Hasil Kios Milik Desa			93.000.000,00	
4.1.3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			90.000.000,00	
4.1.3.99		Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			90.000.000,00	
4.1.4		Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			33.000.000,00	
4.1.4.90		Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			33.000.000,00	
4.2		Pendapatan Transfer			<b>2.487.399.605,00</b>	
4.2.1		Dana Desa			1.422.826.000,00	
4.2.1.01		Dana Desa			1.422.826.000,00	
4.2.2		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			610.571.063,00	
4.2.2.01		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			610.571.063,00	
4.2.3		Alokasi Dana Desa			454.002.542,00	
4.2.3.01		Alokasi Dana Desa			454.002.542,00	
4.3		Pendapatan Lain-lain			<b>2.000.000,00</b>	
4.3.6		Bunga Bank			2.000.000,00	
4.3.6.01		Bunga Bank			2.000.000,00	
5		<b>BELANJA</b>				
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>2.815.899.605,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA					
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa					
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	Orang	72.000.000,00	ADD, PBH	
1.01.01	Belanja Pegawai			72.000.000,00		
1.01.01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			72.000.000,00		
1.01.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			60.000.000,00		
1.01.01	Tunjangan Kepala Desa			12.000.000,00		
1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	9	Orang	383.040.000,00	ADD, PBH	
1.01.02	Belanja Pegawai			383.040.000,00		
1.01.02	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			383.040.000,00		
1.01.02	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			319.200.000,00		
1.01.02	Tunjangan Perangkat Desa			63.840.000,00		
1.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10	orang	0,00	DDS, PBH	
1.01.03	Belanja Pegawai			0,00		
1.01.03	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			0,00		
1.01.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			0,00		
1.01.03	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			0,00		
1.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	100	Paket	229.910.991,87	ADD, DDS, DLL, PAD, PE	
1.01.04	Belanja Barang dan Jasa			229.910.991,87		
1.01.04	Belanja Barang Perengkapkan			67.081.315,95		
1.01.04	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			12.000.000,00		
1.01.04	Belanja Perengkapkan Alat-alat Listrik			5.081.315,95		
1.01.04	Belanja Perengkapkan Alat Rumah dan Bahan Kebersihan			2.000.000,00		
1.01.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			12.000.000,00		
1.01.04	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			8.000.000,00		
1.01.04	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			22.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04	5.2.1.09	Belanja Pakaiian Dinas/Seragam/Atribut			6.000.000,00	
1.01.04	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			85.800.000,00	
1.01.04	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			30.600.000,00	
1.01.04	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			55.200.000,00	
1.01.04	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			47.000.000,00	
1.01.04	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			9.000.000,00	
1.01.04	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			30.000.000,00	
1.01.04	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			8.000.000,00	
1.01.04	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			25.029.675,92	
1.01.04	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			10.800.000,00	
1.01.04	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			7.000.000,00	
1.01.04	5.2.5.04	Belanja Jasa Langganan Telepon			360.000,00	
1.01.04	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			4.500.000,00	
1.01.04	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			2.369.675,92	
1.01.04	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			0,00	
1.01.04	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			5.000.000,00	
1.01.04	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			5.000.000,00	
<b>1.01.05.</b>		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>12</b>	<b>bulan</b>	<b>66.600.000,00</b>	<b>ADD PBH</b>
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>66.600.000,00</b>	
1.01.05.	5.1.4	Tunjangan BPD			66.600.000,00	
1.01.05	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			66.600.000,00	
1.01.05	5.1.4.90	Jaminan Ketenagakerjaan BPD			0,00	
<b>1.01.06.</b>		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaiian Seragam, Listrik dll)</b>	<b>100</b>	<b>paket</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>PBH</b>
1.01.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>12.000.000,00</b>	
1.01.06	5.2.1	Belanja Barang Pertengkapan			8.500.000,00	
1.01.06	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.300.000,00		
1.01.06	Belanja Perjalanan Dinas			3.500.000,00		
1.01.06	Belanja Bantuan Transport			3.500.000,00		
<b>1.01.07.</b>	<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>		33	<b>37.200.000,00</b>	PBH	
1.01.07	Belanja Barang dan Jasa			<b>37.200.000,00</b>		
1.01.07	Belanja Operasional Perkantoran			37.200.000,00		
1.01.07	Belanja Insentif/Operasional RT/RW			37.200.000,00		
<b>1.01.08.</b>	<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</b>		100	<b>42.700.000,00</b>	DDS	
1.01.08	Belanja Barang dan Jasa			<b>40.700.000,00</b>		
1.01.08	Belanja Barang Perengkapan			19.000.000,00		
1.01.08	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			2.000.000,00		
1.01.08	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			17.000.000,00		
1.01.08	Belanja Jasa Honorarium			5.500.000,00		
1.01.08	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultanan/Narasumber			2.000.000,00		
1.01.08	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.500.000,00		
1.01.08	Belanja Perjalanan Dinas			3.200.000,00		
1.01.08	Belanja Bantuan Transport			3.200.000,00		
1.01.08	Belanja Jasa Sewa			1.500.000,00		
1.01.08	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perengkapan			1.500.000,00		
1.01.08	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			11.500.000,00		
1.01.08	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			6.500.000,00		
1.01.08	Belanja Bantuan Bahan Bangunan yang diserahkan kepada masyarakat			5.000.000,00		
1.01.08	Belanja Tidak Terduga			<b>2.000.000,00</b>		
1.01.08	Belanja Tidak Terduga			2.000.000,00		
1.01.08	Belanja Tidak Terduga			2.000.000,00		
<b>1.01.90.</b>	<b>Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa</b>		1	<b>49.780.000,00</b>	PAD, PBH	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.90	5.1	Belanja Pegawai			49.780.000,00	
1.01.90	5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			49.780.000,00	
1.01.90	5.1.1.90	Tunjangan Keluarga			6.000.000,00	
1.01.90	5.1.1.91	Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa			36.000.000,00	
1.01.90	5.1.1.92	Tunjangan Penambahan Kebutuhan Kepala Desa			2.500.000,00	
1.01.90	5.1.1.94	Uang Makan			5.280.000,00	
<b>1.01.91.</b>		<b>Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa</b>	<b>9</b>	<b>OB</b>	<b>219.940.000,00</b>	<b>PAD, PBH</b>
1.01.91	5.1	Belanja Pegawai			219.940.000,00	
1.01.91	5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			219.940.000,00	
1.01.91	5.1.2.90	Tunjangan Keluarga			31.920.000,00	
1.01.91	5.1.2.91	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa			127.200.000,00	
1.01.91	5.1.2.92	Tunjangan Penambah Kebutuhan Perangkat Desa			13.300.000,00	
1.01.91	5.1.2.94	Uang Makan			47.520.000,00	
<b>1.01.93.</b>		<b>Purna Bhakti Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tali Asih BPD</b>	<b>1</b>	<b>OB</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>PAD</b>
1.01.93	5.1	Belanja Pegawai			20.000.000,00	
1.01.93	5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			20.000.000,00	
1.01.93	5.1.1.93	Purna Bakti Kepala Desa			20.000.000,00	
<b>01.02.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>			<b>51.000.000,00</b>	
<b>1.02.01.</b>		<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>	<b>2</b>	<b>unit</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>PBH</b>
1.02.01	5.3	Belanja Modal			41.000.000,00	
1.02.01	5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			41.000.000,00	
1.02.01	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			25.000.000,00	
1.02.01	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			16.000.000,00	
<b>1.02.02.</b>		<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>	<b>10</b>	<b>unit</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>PBH</b>
1.02.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
1.02.02	5.2.6	Belanja Pemeliharaan			10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
1 02 02	5.2.6.03			5.000.000,00	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan				
1 02 02	5.2.6.04			5.000.000,00	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan				
01.03.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			10.000.000,00	
1.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1	paket	10.000.000,00	DDS
1 03 02	5.2			10.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa				
1 03 02	5.2.1			5.500.000,00	
	Belanja Barang Perengkkapan				
1 03 02	5.2.1.01			1.500.000,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				
1 03 02	5.2.1.06			4.000.000,00	
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				
1 03 02	5.2.2			4.500.000,00	
	Belanja Jasa Honorarium				
1 03 02	5.2.2.04			1.500.000,00	
	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				
1 03 02	5.2.2.05			3.000.000,00	
	Belanja Jasa Honorarium Petugas				
01.04.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			68.867.400,00	
1.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1	kali	12.570.000,00	DDS
1 04 01	5.2			12.570.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa				
1 04 01	5.2.1			3.770.000,00	
	Belanja Barang Perengkkapan				
1 04 01	5.2.1.05			300.000,00	
	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan				
1 04 01	5.2.1.06			3.470.000,00	
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				
1 04 01	5.2.2			1.800.000,00	
	Belanja Jasa Honorarium				
1 04 01	5.2.2.04			1.800.000,00	
	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				
1 04 01	5.2.3			7.000.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas				
1 04 01	5.2.3.90			7.000.000,00	
	Belanja Bantuan Transport				
1.04.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rambung desa Non Reguler)	10	Kali	15.000.000,00	DDS
1 04 02	5.2			15.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa				
1 04 02	5.2.1			8.100.000,00	
	Belanja Barang Perengkkapan				
1 04 02	5.2.1.05			900.000,00	
	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan				

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.04.02	Belanja Barang Konsumsi: (Makan/Minum)					
	5.2.1.06				7.200.000,00	
1.04.02	Belanja Jasa Honorarium				5.750.000,00	
	5.2.2.					
1.04.02	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				5.750.000,00	
	5.2.2.04					
1.04.02	Belanja Perjalanan Dinas				1.150.000,00	
	5.2.3					
1.04.02	Belanja Bantuan Transport				1.150.000,00	
	5.2.3.90					
<b>1.04.03.</b>	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</b>					
	5.2.				<b>13.264.000,00</b>	DDS
1.04.03	Belanja Barang dan Jasa				13.264.000,00	
	5.2.1.					
1.04.03	Belanja Barang Perengkapan				9.064.000,00	
	5.2.1.01				500.000,00	
1.04.03	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				1.564.000,00	
	5.2.1.05					
1.04.03	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				7.000.000,00	
	5.2.1.06					
1.04.03	Belanja Barang Konsumsi: (Makan/Minum)				4.200.000,00	
	5.2.2.					
1.04.03	Belanja Jasa Honorarium				1.500.000,00	
	5.2.2.04					
1.04.03	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				2.700.000,00	
	5.2.2.05					
<b>1.04.04.</b>	<b>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPU dll)</b>					
	5.2.				<b>13.713.400,00</b>	PBH
1.04.04	Belanja Barang dan Jasa				13.713.400,00	
	5.2.1.					
1.04.04	Belanja Barang Perengkapan				1.793.400,00	
	5.2.1.05				150.000,00	
1.04.04	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				1.643.400,00	
	5.2.1.06					
1.04.04	Belanja Barang Konsumsi: (Makan/Minum)				11.920.000,00	
	5.2.3.					
1.04.04	Belanja Perjalanan Dinas				11.220.000,00	
	5.2.3.02					
1.04.04	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota				700.000,00	
	5.2.3.90					
<b>1.04.06.</b>	<b>Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)</b>					
	5.2.				<b>4.320.000,00</b>	PBH
1.04.06	Belanja Barang dan Jasa				4.320.000,00	
	5.2.1.					
1.04.06	Belanja Barang Perengkapan				2.920.000,00	
	5.2.1.06					
1.04.06	Belanja Barang Konsumsi: (Makan/Minum)				2.920.000,00	

KODE REKENING	1	2	URAIAN	3	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
					4 VOLUME	5 SATUAN		
1.04.06	5.2.3.		Belanja Perjalanan Dinas				1.400.000,00	
1.04.06	5.2.3.90		Belanja Bantuan Transport				1.400.000,00	
<b>1.04.08.</b>			<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>	<b>1</b>	<b>paket</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>DOS</b>
1.04.08.	5.2.		Belanja Barang dan Jasa				<b>5.000.000,00</b>	
1.04.08	5.2.5.		Belanja Operasional Perkantoran				2.500.000,00	
1.04.08	5.2.5.92		Belanja Jasa Domain Desa				2.500.000,00	
1.04.08	5.2.6.		Belanja Pemeliharaan				2.500.000,00	
1.04.08	5.2.6.08		Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komur				2.500.000,00	
<b>1.04.90.</b>			<b>Jasa Pendampingan Hukum</b>	<b>1</b>	<b>Paket</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>PBH</b>
1.04.90	5.2.		Belanja Barang dan Jasa				<b>5.000.000,00</b>	
1.04.90	5.2.5.		Belanja Operasional Perkantoran				5.000.000,00	
1.04.90	5.2.5.90		Belanja Jasa Pendampingan Hukum				5.000.000,00	
<b>01.05.</b>			<b>Sub Bidang Pertanahan</b>				<b>99.265.659,45</b>	
<b>1.05.06.</b>			<b>Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</b>	<b>1</b>	<b>paket</b>		<b>7.680.000,00</b>	<b>PAD</b>
1.05.06.	5.2.		Belanja Barang dan Jasa				<b>7.680.000,00</b>	
1.05.06	5.2.5.		Belanja Operasional Perkantoran				7.680.000,00	
1.05.06	5.2.5.07		Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak				7.680.000,00	
<b>1.05.91.</b>			<b>Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	<b>1</b>	<b>paket</b>		<b>91.585.659,45</b>	<b>PBH</b>
1.05.91	5.2.		Belanja Barang dan Jasa				<b>91.585.659,45</b>	
1.05.91	5.2.1.		Belanja Barang Perlengkapan				11.000.000,00	
1.05.91.	5.2.1.05		Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				1.000.000,00	
1.05.91.	5.2.1.06		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				10.000.000,00	
1.05.91	5.2.3.		Belanja Perjalanan Dinas				60.000.000,00	
1.05.91.	5.2.3.02		Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota				44.000.000,00	
1.05.91.	5.2.3.90		Belanja Bantuan Transport				6.000.000,00	
1.05.91	5.2.7.		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				30.585.659,45	
1.05.91	5.2.7.91		Belanja Hadiah Kegiatan				30.585.659,45	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					
02.01	Sub Bidang Pendidikan				831.897.806,73	
2.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)		5	orang	63.010.000,00	DDS
2.01.01	Belanja Barang dan Jasa				21.420.000,00	
2.01.01	Belanja Jasa Honorarium				21.420.000,00	
2.01.01	Belanja Jasa Pelaksana Pendidikan Desa				21.420.000,00	
2.01.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)		10	paket	19.050.000,00	DDS
2.01.02	Belanja Barang dan Jasa				5.000.000,00	
2.01.02	Belanja Barang Perengkkapan				5.000.000,00	
2.01.02	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				5.000.000,00	
2.01.02	Belanja Modal				14.050.000,00	
2.01.02	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat				5.300.000,00	
2.01.02	Belanja Modal Peralatan Komputer				3.500.000,00	
2.01.02	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan				1.800.000,00	
2.01.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman				8.750.000,00	
2.01.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material				8.750.000,00	
2.01.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)		12	paket	12.540.000,00	DDS
2.01.08	Belanja Barang dan Jasa				12.540.000,00	
2.01.08	Belanja Barang Perengkkapan				4.500.000,00	
2.01.08	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				2.500.000,00	
2.01.08	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				2.000.000,00	
2.01.08	Belanja Jasa Honorarium				5.540.000,00	
2.01.08	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				500.000,00	
2.01.08	Belanja Jasa Honorarium Perugas				5.040.000,00	
2.01.08	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				2.500.000,00	
2.01.08	Belanja Hadiah Kegiatan				2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
2.01.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi				
2.01.10	Belanja Barang dan Jasa	2	paket	10.000.000,00	PAD
2.01.10	Belanja Barang Perengkapan			10.000.000,00	
2.01.10	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.000.000,00	
2.01.10	Belanja Barang dan Jasa yang Diserankan kepada Masyarakat			4.000.000,00	
2.01.10	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserankan kepada Masyarakat			4.000.000,00	
02.02	Sub Bidang Kesehatan			295.802.000,00	
2.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb)	12	bulan	8.500.000,00	DDS
2.02.01	Belanja Barang dan Jasa			8.500.000,00	
2.02.01	Belanja Barang Perengkapan			1.000.000,00	
2.02.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			7.500.000,00	
2.02.01	Belanja Jasa Honorarium			7.500.000,00	
2.02.01	Belanja Jasa Honorarium Petugas				
2.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insektif)	12	bulan	190.400.000,00	DDS
2.02.02	Belanja Barang dan Jasa			155.950.000,00	
2.02.02	Belanja Barang Perengkapan			123.550.000,00	
2.02.02	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			4.750.000,00	
2.02.02	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.18.800.000,00	
2.02.02	Belanja Jasa Honorarium			32.400.000,00	
2.02.02	Belanja Jasa Honorarium Petugas			32.400.000,00	
2.02.02	Belanja Modal			34.450.000,00	
2.02.02	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			34.450.000,00	
2.02.02	Belanja Modal Peralatan Meubelair dan Aksesoris Ruang			4.150.000,00	
2.02.02	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan			30.300.000,00	
2.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1	paket	10.000.000,00	DDS

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
2.02.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
2.02.03	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan			4.500.000,00	
2.02.03	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			180.000,00	
2.02.03	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.320.000,00	
2.02.03	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
2.02.03	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.500.000,00	
2.02.03	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			4.000.000,00	
2.02.03	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			4.000.000,00	
<b>2.02.04.</b>		<b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>	10	paket	<b>58.902.000,00</b>	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			58.902.000,00	
2.02.04.	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan			43.822.000,00	
2.02.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.705.000,00	
2.02.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			540.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			40.577.000,00	
2.02.04.	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			6.130.000,00	
2.02.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.130.000,00	
2.02.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.000.000,00	
2.02.04.	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			8.950.000,00	
2.02.04.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			8.950.000,00	
<b>2.02.90.</b>		<b>Penyelenggaraan Semam Desa</b>	15	kali	<b>28.000.000,00</b>	DDS
2.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			28.000.000,00	
2.02.90.	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan			19.125.000,00	
2.02.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			725.000,00	
2.02.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			15.000.000,00	
2.02.90.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			3.400.000,00	
2.02.90.	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			5.775.000,00	
2.02.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			5.775.000,00	

KODE REKENING	1	2	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
				4 VOLUME	5 SATUAN		
2.02.90	5.2.4		Belanja Jasa Sewa			3.100.000,00	
2.02.90	5.2.4.02		Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perengkapan			3.100.000,00	
<b>02.03.</b>			<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			<b>431.980.606,73</b>	
<b>2.03.01.</b>			<b>Pemeliharaan Jalan Desa</b>	1	paket	<b>200.000.000,00</b>	DDS
2.03.01	5.3		Belanja Modal			200.000.000,00	
2.03.01	5.3.5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			200.000.000,00	
2.03.01	5.3.5.01		Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan			900.000,00	
2.03.01	5.3.5.03		Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			196.100.000,00	
2.03.01	5.3.5.05		Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			3.000.000,00	
<b>2.03.06.</b>			<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan</b>	12	paket	<b>19.244.699,23</b>	PAD
2.03.06	5.2		Belanja Barang dan Jasa			19.244.699,23	
2.03.06	5.2.6		Belanja Pemeliharaan			17.244.699,23	
2.03.06	5.2.6.04		Belanja Pemeliharaan Bangunan			17.244.699,23	
2.03.06	5.2.7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.000.000,00	
2.03.06	5.2.7.90		Belanja Barntuan Bahan Bangunan yang diserahkan kepada masyarakat			2.000.000,00	
<b>2.03.07.</b>			<b>Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa</b>	12	paket	<b>10.000.000,00</b>	PAD
2.03.07	5.2		Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
2.03.07	5.2.7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			10.000.000,00	
2.03.07	5.2.7.01		Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			10.000.000,00	
<b>2.03.09.</b>			<b>Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa</b>	12	unit	<b>5.000.000,00</b>	PAD
2.03.09	5.2		Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
2.03.09	5.2.6		Belanja Pemeliharaan			5.000.000,00	
2.03.09	5.2.6.04		Belanja Pemeliharaan Bangunan			5.000.000,00	
<b>2.03.11.</b>			<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)</b>	3	paket	<b>96.000.000,00</b>	DDS
2.03.11	5.3		Belanja Modal			96.000.000,00	
2.03.11	5.3.5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			96.000.000,00	

KODE REKENING	1	2	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
				4 VOLUME	5 SATUAN		
2.03.11		5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.650.000,00	
2.03.11		5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			38.255.000,00	
2.03.11		5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			53.795.000,00	
2.03.11		5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			0,00	
2.03.11		5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			2.300.000,00	
<b>2.03.14.</b>			<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)</b>			<b>101.735.907,50</b>	<b>DDS</b>
2.03.14		5.3.	Belanja Modal		1000	101.735.907,50	
2.03.14		5.3.7	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			101.735.907,50	
2.03.14		5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			101.735.907,50	
2.03.14		5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			900.000,00	
2.03.14		5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			39.165.609,34	
2.03.14		5.3.7.05	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan			58.670.298,16	
<b>02.04.</b>			<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>			<b>41.105.000,00</b>	
<b>2.04.05.</b>			<b>Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Partit diluar Prasarana Jalan))</b>		2500	25.705.000,00	<b>DDS</b>
2.04.05		5.3.	Belanja Modal			25.705.000,00	
2.04.05		5.3.7	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			25.705.000,00	
2.04.05		5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			20.000.000,00	
2.04.05		5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			5.705.000,00	
<b>2.04.07.</b>			<b>Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)</b>		1	10.000.000,00	<b>DDS</b>
2.04.07		5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
2.04.07		5.2.6	Belanja Pemeliharaan			10.000.000,00	
2.04.07		5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			5.000.000,00	
2.04.07		5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			5.000.000,00	
<b>2.04.09.</b>			<b>Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milk Desa</b>		1	5.400.000,00	<b>PAD</b>
2.04.09		5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.09	5.2.1 Belanja Barang Perengskapan				2.000.000,00	
2.04.09	5.2.1.11 Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan				1.000.000,00	
2.04.09	5.2.1.12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian				1.000.000,00	
2.04.09	5.2.2 Belanja Jasa Honorarium				2.000.000,00	
2.04.09	5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas				2.000.000,00	
2.04.09	5.2.7 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				1.400.000,00	
2.04.09	5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/ikan				1.400.000,00	
03	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>				<b>215.025.000,00</b>	
03.01	<b>Sub Bidang Ketertarikan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>				<b>43.000.000,00</b>	
3.01.02	<b>Penguatan &amp; Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pendes</b>		50 orang		<b>33.000.000,00</b>	PAD
3.01.02	5.2 Belanja Barang dan Jasa				33.000.000,00	
3.01.02	5.2.2 Belanja Jasa Honorarium				5.900.000,00	
3.01.02	5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Protesis/Konsultansi/Narasumber				1.500.000,00	
3.01.02	5.2.2.08 Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis				4.400.000,00	
3.01.02	5.2.3 Belanja Perjalanan Dinas				20.250.000,00	
3.01.02	5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota				20.250.000,00	
3.01.02	5.2.4 Belanja Jasa Sewa				6.850.000,00	
3.01.02	5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas				6.850.000,00	
3.01.03	<b>Koordinasi Pembinaan Keamanan, Keterlibatan &amp; Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa</b>		50 orang		<b>10.000.000,00</b>	PBH
3.01.03	5.2 Belanja Barang dan Jasa				10.000.000,00	
3.01.03	5.2.1 Belanja Barang Perengskapan				3.000.000,00	
3.01.03	5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				3.000.000,00	
3.01.03	5.2.2 Belanja Jasa Honorarium				7.000.000,00	
3.01.03	5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas				7.000.000,00	
03.02	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>				<b>88.375.000,00</b>	

KODE REKENING	1	2	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
				4 VOLUME	5 SATUAN		
3.02.03.			3				
			Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10	paket	66.775.000,00	DDS, PAD
3.02.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa			66.775.000,00	
3.02.03	5.2.1.		Belanja Barang Perlengkapan			35.000.000,00	
3.02.03	5.2.1.05		Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
3.02.03	5.2.1.06		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			34.700.000,00	
3.02.03	5.2.2.		Belanja Jasa Honorarium			1.527.000,00	
3.02.03	5.2.2.04		Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.527.000,00	
3.02.03	5.2.4.		Belanja Jasa Sewa			30.248.000,00	
3.02.03	5.2.4.02		Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			26.600.000,00	
3.02.03	5.2.4.03		Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			3.648.000,00	
3.02.90.			Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	4	orang	21.600.000,00	PBH
3.02.90	5.2.		Belanja Barang dan Jasa			21.600.000,00	
3.02.90	5.2.2.		Belanja Jasa Honorarium			21.600.000,00	
3.02.90	5.2.2.05		Belanja Jasa Honorarium Petugas			21.600.000,00	
03.03.			Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			45.400.000,00	
3.03.01.			Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tki Kec/Kab/Kota	12	paket	10.000.000,00	DDS
3.03.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
3.03.01	5.2.1		Belanja Barang Perlengkapan			7.500.000,00	
3.03.01	5.2.1.06		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.000.000,00	
3.03.01	5.2.1.09		Belanja Pakain Dinas/Seragam/Alat/tribut			2.500.000,00	
3.03.01	5.2.2.		Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
3.03.01	5.2.2.05		Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.000.000,00	
3.03.01	5.2.3.		Belanja Pengantanan Dinas			1.500.000,00	
3.03.01	5.2.3.90		Belanja Bantuan Transport			1.500.000,00	
3.03.02.			Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	1	paket	20.000.000,00	DDS
3.03.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa			20.000.000,00	

KODE REKENING	1	2	URAIAN	3	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
					4	5		
3.03.02	5.2.1		Belanja Barang Perlengkapan			3.300.000,00		
3.03.02	5.2.1.05		Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00		
3.03.02	5.2.1.06		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.150.000,00		
3.03.02	5.2.2		Belanja Jasa Honorarium			1.950.000,00		
3.03.02	5.2.2.04		Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.950.000,00		
3.03.02	5.2.3		Belanja Perjalanan Dinas			14.750.000,00		
3.03.02	5.2.3.03		Belanja Kursus Pelatihan			12.000.000,00		
3.03.02	5.2.3.90		Belanja Bantuan Transport			2.750.000,00		
<b>3.03.04.</b>			<b>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa</b>		10	<b>8.000.000,00</b>	<b>DOS</b>	
3.03.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa			8.000.000,00		
3.03.04	5.2.7.		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			8.000.000,00		
3.03.04	5.2.7.01		Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		2	8.000.000,00	PBH	
<b>3.03.06.</b>			<b>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</b>			<b>7.400.000,00</b>		
3.03.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa			7.400.000,00		
3.03.06	5.2.1.		Belanja Barang Perlengkapan			5.400.000,00		
3.03.06	5.2.1.01		Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.400.000,00		
3.03.06	5.2.1.06		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.000.000,00		
3.03.06	5.2.3.		Belanja Perjalanan Dinas			2.000.000,00		
3.03.06	5.2.3.90		Belanja Bantuan Transport			2.000.000,00		
<b>03.04.</b>			<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>			<b>38.250.000,00</b>		
<b>3.04.02.</b>			<b>Pembinaan LKMD/LPML/PMD</b>		10	<b>24.120.000,00</b>	<b>PAD, PBH</b>	
3.04.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa			24.120.000,00		
3.04.02	5.2.1.		Belanja Barang Perlengkapan			5.320.000,00		
3.04.02	5.2.1.01		Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.000.000,00		
3.04.02	5.2.1.06		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.320.000,00		
3.04.02	5.2.3.		Belanja Perjalanan Dinas			6.300.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
3.04.02	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			6.300.000,00	
3.04.02	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			12.500.000,00	
3.04.02	5.2.7.01	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			12.500.000,00	
<b>3.04.03.</b>		<b>Pembinaan PKK</b>	<b>2</b>	<b>paket</b>	<b>14.130.000,00</b>	<b>PAD</b>
3.04.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa			14.130.000,00	
3.04.03	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan			8.380.000,00	
3.04.03	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.830.000,00	
3.04.03	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.550.000,00	
3.04.03	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			2.500.000,00	
3.04.03	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.500.000,00	
3.04.03	5.2.3	Belanja Peralatan Dinas			5.250.000,00	
3.04.03	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			5.250.000,00	
<b>04</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>305.000.000,00</b>	
<b>04.02.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>			<b>285.000.000,00</b>	
<b>4.02.03.</b>		<b>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</b>			<b>285.000.000,00</b>	<b>DDS</b>
4.02.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa			285.000.000,00	
4.02.03	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			285.000.000,00	
4.02.03	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			285.000.000,00	
<b>04.04</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>			<b>20.000.000,00</b>	
<b>4.04.01.</b>		<b>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>2</b>	<b>paket</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>DDS</b>
4.04.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa			20.000.000,00	
4.04.01	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan			3.300.000,00	
4.04.01	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
4.04.01	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.150.000,00	
4.04.01	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			1.950.000,00	
4.04.01	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.950.000,00	

KODE REKENING	1	2	URAIAN	3	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
					4 VOLUME	5 SATUAN		
4.04.01		5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas				14.750.000,00	
4.04.01		5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan				12.000.000,00	
4.04.01		5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport				2.750.000,00	
<b>05</b>			<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>				<b>174.000.000,00</b>	
<b>05.01.</b>			<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>				<b>15.000.000,00</b>	<b>DDS</b>
<b>05.01.00.</b>			<b>Kegiatan Penanggulangan Bencana</b>				<b>15.000.000,00</b>	
5.01.00		5.4	Belanja Tidak Terduga				15.000.000,00	
5.01.00		5.4.1	Belanja Tidak Terduga				15.000.000,00	
5.01.00		5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga				15.000.000,00	
<b>05.02.</b>			<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>				<b>15.000.000,00</b>	<b>DDS</b>
<b>05.02.00.</b>			<b>Penanganan Keadaan Darurat</b>				<b>15.000.000,00</b>	
5.02.00		5.4	Belanja Tidak Terduga				15.000.000,00	
5.02.00		5.4.1	Belanja Tidak Terduga				15.000.000,00	
5.02.00		5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga				15.000.000,00	
<b>05.03.</b>			<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>				<b>144.000.000,00</b>	<b>DDS</b>
<b>05.03.00.</b>			<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>				<b>144.000.000,00</b>	
5.03.00		5.4	Belanja Tidak Terduga				144.000.000,00	
5.03.00		5.4.1	Belanja Tidak Terduga				144.000.000,00	
5.03.00		5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga				144.000.000,00	
			<b>JUMLAH BELANJA</b>				<b>2.888.226.658,05</b>	
			<b>SURPLUS DEFISIT</b>				<b>(72.327.053,05)</b>	
			<b>PEMBIAYAAN</b>					
6.			Penerimaan Pembiayaan				172.327.053,05	
6.1			SILPA Tahun Sebelumnya				172.327.053,05	
6.1.1			SILPA Tahun Sebelumnya				172.327.053,05	
6.1.1.01			Pengeluaran Pembiayaan				100.000.000,00	
6.2			Penyertaan Modal Desa				100.000.000,00	
6.2.2								

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT			ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN			
1	2		4	5	6	7
	Penyerahan Modal Desa				100.000.000,00	
	6.2.2.01				72.327.053,05	
	PEMBIAYAAN NETTO					
	SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN				0,00	


  
 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOMULYO  
 KECAMATAN SIDOMULYO  
 KEPALA DESA  
 TENGGULUNAN  
 AKHMAD DDM MAJIN

Tenggulunan, 31 December 2025